

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul At-Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan, Magistra Insani Press, Yogyakarta, 2004.**
- Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: PT. Kharisma Putera Utama, 2013.**
- Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, Hukum Bisnis Ushak Perusahaan Teori & Contoh Kasus, Jakarta: Jakarta: Kencana, 2008**
- Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Volume 1. Kencana. 2012**
- Andi Fahmi Lubis. dkk. Hukum Antara Teks & Konteks Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jakarta. 2009.**
- Andi Fahmi Lubis. dkk. Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Jakarta. 2017.**
- Danialsyah.dkk. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek. Medan. CV. Sentosa Deli Mandiri. 2023.**
- Dolfries J Neununy, “Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir”, Jurnal, Balobe Law Journal, Vol.1, (No.2), 2021**
- Endang Hadrian & Lukman Hakim. Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. CV Budi Utama. Yogyakarta. 2020.**
- Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.**
- Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.**
- L. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha, Laros,Sidoarjo, 2012.**
- L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. PT. Revika Aditama. Bandung. 2006.**
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.**

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Alumni, Bandung, 2002

Otti Ilham Khair, “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia”, Jurnal, Widya Pranata Hukum, Vol.3, (No.2), 2021.

Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta. 2008

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta : PT. Gramedia, 1989.

Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), Jakarta : Rajawali Pers, 2010

Rachmadi Usman, 2013. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5-6

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Satjipto Rahardjo dalam Muhammad Sadi Is, Etika & Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015.

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010.

S.M Hutagulung, Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta : Ghalia Indonesia, 201

Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan area University Press, Medan, 2012.

ARTIKEL/JURNAL

Anggita Darmayoni, “Merger Terkait Dengan Indikasi Penguasaan Pangsa Pasar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

**Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”,
(Jurnal Universitas Udayana, tahun 2016)**

Ajeng Chita Sekarsari, “Analisis Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perkara No: 10/Kppu-L/2009 Mengenai Penetapan Komisi dan Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014

Aubert dalam The Journal of Conflict Resolution Vol.VII,1963: Nindyo Pramono, 1998

Bhakti, Yudha, 1998, Analisis Ekonomi Terhadap Terhadap Hukum Persaingan, Makalah dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam rangka Globalisasi, bekerjasama dengan Fakultas Hukum Unpad, 30 April 1998, Bandung.

Enjum Jumhana. Achmad Nashrudin Priatna. “Reformasi Hukum (Dagang) Kajian Khusus Terhadap Perlunya Uu Anti Monopoli Atau Persainganusaha Tidak Sehat Pasca Uu Cipta Kerja”. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 2 Juli 2023.

Fairuz Zahirah Zihni Hamdan. dkk. “Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum”. Media Iuris. Volume 6 No 1. Februari 2023.

Fence M. Wantu. “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum. Keadilan. Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata” Mimbar Hukum Volume 25. Nomor 2. Juni 2013.

Gloria Damaiyanti Sidauruk, Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha, LEXRenaissan NO. 1 VOL. 6 Januari 2021

Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar, Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja, Jurnal USM Law Review, Vol 6 Nomor 1 Tahun 2023

Nurdiani Yusnita Sari. “Implementasi Penjatuhan Denda dalam Putusan Perkara Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Unes Law Review. Vol. 6. No. 1. September 2023.

Rai Mantili, Hazar Kusmayanti dan Anita Afriana, “Problematisa Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan

Kepastian Hukum”, Jurnal Unpad, PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016

Rahmadi Tektona, “Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Jurnal Persaingan Usaha 2, No. 1 (2022):

Rian Benedictus Rumagit, Analisis Putusan KPPU Yang Melampaui Kewenangan Berdasarkan UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha, Jurnal Supremasi, Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024

Tata Wijayanta. Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru. *Mimbar Hukum*. Volume 22. Nomor 2. Juni 2010.

Toifur & Ditha Wiradiputra. “Kritik Atas Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha”. *Pagaruyuang Law Journal*. Volume 6 Nomor 1. Juli 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat,

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga;

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang;